



Dampak Ekonomi Pembangunan SPALD-T terhadap Pelaku Usaha dan Implementasi Kebijakan Perlindungannya di Kota Semarang

Ai Sholikhah^{1*}, Rini Werdiningsih², Emiliana Sri Pudjiarti³

¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia

Email: ratupokki73@gmail.com^{1*}, rini-werdi@untagsmg.ac.id², emilpujiarti@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ratupokki73@gmail.com

Abstract. *The construction of a Centralized Domestic Wastewater Management System (SPALD-T) in Semarang City has the potential to cause temporary disruptions to community economic activities, especially business actors around construction sites. This study aims to analyze the level of disruption to the development of SPALD-T, identify the economic impact experienced by business actors, and explain the implementation of protection policies for affected communities. The research uses a mixed-methods approach with a sequential explanatory design, which combines quantitative and qualitative analysis. Quantitative data were obtained through questionnaires of 76 business actors, while qualitative data were obtained through interviews with 8 informants consisting of 4 consultants, 2 contractors, and 2 civil servants. The results showed that the level of development disruption was in the medium category with an average value of 3.14, while the economic impact was in the low category with an average value of 2.14. Correlation analysis showed a positive and significant relationship between the level of development disruption and economic impact, with values of $r = 0.557$ and $p < 0.001$, while the value of $R^2 = 0.311$ showed that 31.1% of the variation in economic impact could be explained by the level of development disruption. The qualitative results show that protection has been supported by communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and complaint management mechanisms, although there is still a gap in understanding among some informants.*

Keywords: *Business Actors; Community Protection; Development Disruption; Economic Impacts; SPALD-T.*

Abstrak. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kota Semarang berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat gangguan pembangunan SPALD-T, mengidentifikasi dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha, serta menjelaskan implementasi kebijakan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, yaitu menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner terhadap 76 pelaku usaha, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan 8 informan yang terdiri atas 4 konsultan, 2 kontraktor, dan 2 PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat gangguan pembangunan berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 3,14, sedangkan dampak ekonomi berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 2,14. Analisis korelasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi dengan nilai $r = 0,557$ dan $p < 0,001$, sedangkan nilai $R^2 = 0,311$ menunjukkan bahwa 31,1% variasi dampak ekonomi dapat dijelaskan oleh tingkat gangguan pembangunan. Hasil kualitatif menunjukkan bahwa perlindungan telah didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan mekanisme pengelolaan keluhan, meskipun masih terdapat kesenjangan pemahaman pada sebagian informan.

Kata kunci: Dampak Ekonomi; Gangguan Pembangunan; Pelaku Usaha; Perlindungan Masyarakat; SPALD-T.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi kelompok yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Salah satu dampak yang sering muncul adalah economic displacement, yaitu terganggunya sumber penghidupan atau aktivitas ekonomi masyarakat akibat perubahan akses, ruang usaha, mobilitas, maupun kondisi lingkungan selama pelaksanaan proyek. Perspektif perlindungan sosial dalam pembangunan menempatkan pemulihan atau perlindungan penghidupan sebagai bagian penting dari keberhasilan pembangunan, karena kompensasi semata tidak selalu cukup untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak (Esteves, 2021). Dalam konteks pembangunan infrastruktur, prinsip tersebut semakin penting karena masyarakat yang terdampak tidak selalu kehilangan aset secara permanen, tetapi dapat mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya aktivitas usaha selama konstruksi.

Sejalan dengan persoalan tersebut, perkembangan kebijakan pembangunan internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak semakin ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan. Asian Development Bank menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam seluruh siklus proyek untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat (Bank, 2024). Dalam praktiknya, perlindungan tersebut mencakup identifikasi masyarakat terdampak, konsultasi, mitigasi dampak, pemberian kompensasi, penanganan keluhan, serta pemulihan penghidupan. Penelitian mengenai penerapan Environmental and Social Framework pada proyek infrastruktur di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi terhadap perlindungan sosial dan realitas implementasinya di lapangan. Dari indikator yang dikaji, hanya sebagian yang telah menunjukkan kinerja sesuai harapan, sehingga kapasitas implementasi menjadi persoalan penting dalam memastikan perlindungan masyarakat terdampak (Mohamad et al., 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan perlindungan sosial belum secara otomatis menjamin keberhasilan implementasinya.

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, perspektif administrasi publik menawarkan penjelasan melalui teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (Edwards, 1980). Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan penyampaian kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur operasional, dan koordinasi antarorganisasi. Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian Sulila (2021) menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian Andiarsa et al. (2023) juga menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut secara bersama-sama berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan yang lebih mutakhir memperlihatkan bahwa model Edwards III tetap relevan untuk menjelaskan persoalan implementasi kebijakan publik, terutama ketika terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya (Habsana et al., 2026).

Meskipun demikian, kajian mengenai implementasi perlindungan sosial dalam proyek infrastruktur lebih banyak menempatkan perhatian pada keberadaan instrumen safeguard, pemenuhan prosedur, atau pencapaian kompensasi, sementara kajian yang secara khusus melihat bagaimana kebijakan perlindungan ekonomi diterjemahkan oleh aktor pelaksana kepada pelaku usaha yang mengalami gangguan aktivitas ekonomi sementara masih relatif terbatas. Padahal, perlindungan terhadap pelaku usaha terdampak membutuhkan koordinasi antara berbagai aktor, kejelasan informasi mengenai hak dan mekanisme kompensasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta prosedur birokrasi yang mampu merespons kondisi lapangan. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya apakah kebijakan perlindungan ekonomi telah tersedia, tetapi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga benar-benar dapat melindungi kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pembangunan.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SPALD-T di Kota Semarang. Pembangunan jaringan perpipaan air limbah merupakan bagian penting dari peningkatan pelayanan sanitasi perkotaan, tetapi pekerjaan konstruksi pada koridor jalan dan kawasan permukiman dapat memengaruhi akses masyarakat menuju tempat usaha, mobilitas pelanggan, ruang parkir,

dan kelancaran kegiatan perdagangan. Berdasarkan hasil Detailed Measurement Survey dan Socio Economic Survey pada salah satu paket jaringan utama SPALD-T Kota Semarang, teridentifikasi 76 pelaku usaha terdampak yang tersebar pada 5 kecamatan. Sebanyak 75 pelaku usaha atau 98,68% pelaku usaha tidak mengalami perubahan, dan 1 pelaku usaha 1,32% mengalami perubahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pemilik usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan pendapatan tenaga kerja yang bergantung pada kegiatan usaha tersebut.

Selain karakteristik jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja terdampak tersebut, karakteristik dampak ekonomi yang muncul juga menunjukkan perlunya pendekatan perlindungan yang tidak seragam. Pelaku usaha memiliki tingkat pendapatan, skala usaha, jumlah pekerja, dan tingkat ketergantungan terhadap akses ke lokasi yang berbeda. Dalam konteks proyek, mekanisme perlindungan ekonomi dirancang dengan mempertimbangkan tingkat gangguan aktivitas usaha. Pelaku usaha yang mengalami penutupan penuh selama konstruksi memperoleh dasar perlindungan berupa kehilangan pendapatan bersih, sedangkan usaha yang masih dapat beroperasi memperoleh kompensasi berdasarkan proporsi dampak yang dialami. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap economic displacement yang menekankan bahwa dampak ekonomi harus diidentifikasi dan ditangani secara proporsional serta diarahkan untuk memulihkan kondisi penghidupan masyarakat terdampak (Esteves, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah menempatkan social safeguards sebagai bagian penting dalam pembangunan SPALD-T perkotaan untuk meminimalkan dampak pembangunan terhadap masyarakat (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022).

Namun, keberadaan mekanisme perlindungan ekonomi tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan secara efektif. Implementasi di tingkat lapangan menghadapi persoalan komunikasi antara pelaksana dan pelaku usaha, kecukupan sumber daya, konsistensi sikap pelaksana dalam menangani dampak, serta kejelasan prosedur dan pembagian kewenangan antaraktor. Kondisi tersebut menjadi penting karena proyek SPALD-T melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, konsultan, kontraktor, hingga masyarakat terdampak. Penelitian mengenai implementasi *social safeguards* di Indonesia juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara standar perlindungan yang direncanakan dengan pelaksanaan aktual di lapangan (Mohamad et al., 2022). Oleh karena itu, masih

terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana kebijakan perlindungan ekonomi diterjemahkan dalam praktik pada proyek infrastruktur sanitasi perkotaan.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memahami implementasi kebijakan perlindungan ekonomi secara lebih spesifik dari perspektif administrasi publik dengan menggunakan teori Edwards III untuk menganalisis hubungan antara desain kebijakan dan praktik perlindungan pelaku usaha terdampak pembangunan SPALD-T Kota Semarang. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan kompensasi, tetapi juga mengkaji bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi proses perlindungan ekonomi masyarakat terdampak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pengelola proyek dalam memperkuat implementasi kebijakan perlindungan ekonomi, khususnya melalui perbaikan komunikasi, koordinasi, kapasitas pelaksana, serta mekanisme penanganan dampak dan keluhan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perlindungan ekonomi pelaku usaha terdampak pembangunan SPALD-T Kota Semarang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam perspektif Edwards III. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan perlindungan ekonomi pelaku usaha terdampak pembangunan SPALD-T Kota Semarang ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi?

2. KAJIAN TEORITIS

Dampak Pembangunan SPALD-T terhadap Aktivitas Usaha

Pembangunan infrastruktur publik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, proses pembangunan tidak selalu memberikan manfaat secara langsung kepada seluruh kelompok masyarakat. Kegiatan konstruksi yang berlangsung pada ruang publik dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Dalam konteks pembangunan jaringan perpipaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pekerjaan konstruksi dapat memengaruhi akses menuju tempat usaha, mobilitas pelanggan, ruang usaha, kelancaran operasional, serta kondisi lingkungan di sekitar tempat usaha.

Dalam perspektif social impact assessment, dampak pembangunan dipahami sebagai konsekuensi yang timbul ketika suatu kebijakan, program, atau proyek mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Vanclay (2003) menjelaskan bahwa dampak sosial mencakup perubahan terhadap cara hidup, aktivitas ekonomi, hubungan sosial, budaya, serta lingkungan tempat masyarakat menjalankan kehidupannya. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, perubahan akses terhadap ruang dan sumber daya yang digunakan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dapat menjadi salah satu bentuk dampak yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dampak pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat akhir infrastruktur, tetapi juga berdasarkan perubahan yang dialami masyarakat selama proses pelaksanaannya.

Konsep tersebut relevan dengan economic displacement yang digunakan dalam kerangka perlindungan sosial dan lingkungan. Economic displacement tidak selalu berarti kehilangan tempat usaha secara permanen, tetapi dapat mencakup kehilangan atau terganggunya sumber pendapatan, akses terhadap aset, pelanggan, maupun sarana penghidupan akibat suatu proyek pembangunan. Dengan demikian, pelaku usaha yang tetap menjalankan kegiatan usahanya selama konstruksi berlangsung tetap dapat mengalami dampak ekonomi apabila akses pelanggan, mobilitas, atau kelancaran kegiatan usaha mengalami gangguan.

Berdasarkan konsep tersebut, dalam penelitian ini tingkat gangguan pembangunan SPALD-T didefinisikan sebagai tingkat intensitas hambatan yang dirasakan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan konstruksi jaringan SPALD-T terhadap kegiatan usaha mereka. Tingkat gangguan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lokasi konstruksi, tetapi juga dengan konsekuensi operasional yang dirasakan pelaku usaha selama kegiatan pembangunan berlangsung.

Untuk memperoleh ukuran yang dapat dianalisis secara kuantitatif, tingkat gangguan pembangunan dalam penelitian ini diukur melalui enam indikator, yaitu gangguan akses pelanggan, gangguan mobilitas pelanggan, gangguan ruang usaha, gangguan kelancaran operasional, durasi gangguan, dan intensitas konstruksi. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat gangguan yang secara langsung dirasakan pelaku usaha selama proses pembangunan SPALD-T.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kahangirwe & Vanclay (2024), misalnya, menemukan bahwa pembangunan proyek jalan dapat menyebabkan *economic displacement* dan gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa perubahan akses, aktivitas ekonomi, dan kondisi sosial selama pembangunan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dampak pembangunan. Penelitian Wulandari & Effendi (2022) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan penurunan jumlah pelanggan dan hambatan distribusi barang bagi pedagang di sekitar lokasi proyek. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa gangguan terhadap akses dan mobilitas dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan aktivitas konstruksi dengan kondisi ekonomi pelaku usaha.

Meskipun demikian, penelitian mengenai gangguan pembangunan pada pelaku usaha lebih banyak dilakukan pada proyek jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi. Penelitian yang secara khusus mengukur tingkat gangguan yang dialami pelaku usaha selama pembangunan jaringan sanitasi perkotaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pembangunan SPALD-T Kota Semarang sebagai konteks khusus untuk mengukur tingkat gangguan yang dialami pelaku usaha selama proses konstruksi. Tingkat gangguan tersebut selanjutnya ditempatkan sebagai variabel independen (X) untuk dianalisis hubungannya dengan dampak ekonomi pelaku usaha.

Dampak Ekonomi Pelaku Usaha

Dampak ekonomi merupakan konsekuensi yang timbul terhadap kondisi ekonomi masyarakat sebagai akibat suatu aktivitas, kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, dampak ekonomi dapat muncul ketika kegiatan konstruksi mengubah akses masyarakat terhadap sumber pendapatan, pelanggan, tempat usaha, maupun sarana yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, dampak ekonomi tidak selalu berupa kehilangan usaha secara permanen, tetapi dapat berupa penurunan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan penerimaan dan aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pembangunan.

Konsep *economic displacement* memberikan dasar teoretis untuk memahami kondisi tersebut. Kehilangan sumber pendapatan atau sarana penghidupan dapat terjadi meskipun masyarakat tidak kehilangan aset secara permanen. Gangguan terhadap akses pelanggan, perubahan mobilitas, berkurangnya waktu operasional, maupun peningkatan biaya usaha dapat mengurangi kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh pendapatan. Perspektif *livelihood restoration* juga menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak perlu memperhatikan kemampuan mereka dalam

mempertahankan atau memulihkan sumber penghidupannya, bukan hanya memberikan penggantian terhadap aset yang hilang.

Berdasarkan konsep tersebut, dampak ekonomi pelaku usaha dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan atau tekanan terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha yang terjadi akibat gangguan aktivitas usaha selama pembangunan SPALD-T. Dampak tersebut mencerminkan konsekuensi yang dirasakan pelaku usaha terhadap penerimaan, pelanggan, waktu operasional, biaya usaha, dan tenaga kerja. Dampak ekonomi dalam penelitian ini diukur melalui enam indikator, yaitu penurunan omzet, penurunan pendapatan bersih, penurunan jumlah pelanggan, kehilangan waktu operasional, peningkatan biaya usaha, dan perubahan jumlah tenaga kerja. Indikator tersebut dipilih untuk menggambarkan dampak ekonomi secara lebih komprehensif, karena kondisi ekonomi usaha tidak hanya dapat dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari perubahan pelanggan, operasional, biaya, dan tenaga kerja.

Penelitian Egze et al. (2023)) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan proses pemindahan atau penataan kembali masyarakat dapat menimbulkan konsekuensi terhadap mata pencaharian. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi belum selalu mampu menghilangkan seluruh dampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Kahangirwe & Vanclay (2024) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat menghasilkan *economic displacement* dan gangguan terhadap mata pencaharian. Sementara itu, Wibowo et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, sehingga diperlukan strategi mitigasi untuk membantu pelaku usaha menghadapi perubahan akibat pembangunan.

Temuan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa dampak ekonomi pembangunan tidak selalu berbentuk penghentian kegiatan usaha. Dampak dapat muncul dalam bentuk penurunan penerimaan, berkurangnya pelanggan, berkurangnya waktu operasional, atau perubahan kemampuan usaha dalam mempertahankan kegiatan ekonominya. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian SPALD-T karena sebagian besar pelaku usaha masih dapat menjalankan kegiatan usahanya selama konstruksi, tetapi tetap berpotensi mengalami tekanan terhadap penerimaan.

Posisi penelitian ini terletak pada upaya mengukur tingkat dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha selama pembangunan SPALD-T, bukan hanya mengidentifikasi keberadaan kerugian ekonomi. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat dampak pada masing-masing indikator sekaligus memperoleh

gambaran agregat mengenai kondisi ekonomi pelaku usaha. Dalam penelitian ini, dampak ekonomi ditempatkan sebagai variabel dependen (Y) yang selanjutnya dianalisis hubungannya dengan tingkat gangguan pembangunan.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Pelaku Usaha

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena keberadaan suatu kebijakan belum menjamin bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai dalam praktik. Implementasi berkaitan dengan bagaimana keputusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan oleh organisasi dan pelaksana di lapangan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan menjadi penting karena perlindungan pelaku usaha terdampak pembangunan SPALD-T tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ketentuan kompensasi, tetapi juga dengan bagaimana ketentuan tersebut dikomunikasikan, didukung sumber daya, dilaksanakan oleh aktor yang terlibat, serta diterapkan melalui prosedur dan koordinasi birokrasi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (Edwards, 1980). Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dapat mendukung ataupun menghambat pelaksanaan kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Kebijakan perlu disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai dampak pembangunan, hak pelaku usaha, mekanisme perlindungan, kompensasi, dan mekanisme pengaduan disampaikan kepada masyarakat terdampak.

Sumber daya berkaitan dengan berbagai dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan. Edwards III menempatkan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas sebagai unsur penting dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, informasi, anggaran atau dukungan pembiayaan, fasilitas pendukung, serta kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan perlindungan terhadap pelaku usaha.

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat menghadapi hambatan apabila pelaksana tidak memiliki komitmen yang memadai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disposisi dilihat dari komitmen pelaksana dalam memberikan

perlindungan, merespons keluhan, membantu masyarakat terdampak, dan menjalankan ketentuan perlindungan secara konsisten.

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, kewenangan, dan koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sedangkan prosedur yang terlalu kompleks atau pembagian kewenangan yang tidak jelas dapat menghambat respons terhadap masyarakat terdampak. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi mencakup kejelasan pembagian peran, prosedur pelaksanaan perlindungan, koordinasi antarpelaksana, serta mekanisme pengelolaan keluhan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa empat dimensi Edwards III masih digunakan untuk menganalisis implementasi berbagai kebijakan publik. Penelitian Susandra et al. (2024), sebagaimana digunakan dalam naskah penelitian ini, menunjukkan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan. Penelitian Habsana et al. (2026) juga menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut dapat digunakan untuk memahami kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi. Sementara itu, Hasanah & Yopan (2026) menunjukkan melalui systematic literature review bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, implementasi kebijakan perlindungan pelaku usaha dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses penerjemahan kebijakan perlindungan ekonomi ke dalam tindakan nyata untuk mengidentifikasi, mengurangi, menangani, dan memberikan perlindungan terhadap dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha selama pembangunan SPALD-T. Implementasi tersebut dianalisis melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Posisi implementasi kebijakan dalam penelitian ini berbeda dengan posisi tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan tidak ditempatkan sebagai variabel independen, dependen, intervening, atau moderasi, tetapi sebagai fokus analisis kualitatif. Penempatan tersebut sesuai dengan desain mixed methods sequential explanatory, yaitu tahap kuantitatif digunakan terlebih dahulu untuk memperoleh hasil mengenai tingkat gangguan dan dampak ekonomi, kemudian data kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap hasil kuantitatif. Desain sequential explanatory memang menempatkan pengumpulan dan

analisis data kuantitatif sebagai tahap awal, yang kemudian diikuti tahap kualitatif untuk menjelaskan atau memperdalam hasil kuantitatif.

Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan perlindungan dilaksanakan dan faktor apa yang mendukung atau menghambat perlindungan pelaku usaha terdampak. Fokus tersebut sekaligus memberikan penjelasan terhadap temuan kuantitatif mengenai mengapa tingkat gangguan pembangunan berada pada kategori tertentu dan mengapa dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha tidak selalu memiliki tingkat yang sama dengan gangguan yang dirasakan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua fokus utama. Kelompok pertama membahas dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat, sedangkan kelompok kedua membahas implementasi kebijakan berdasarkan perspektif Edwards III. Penelitian Egze et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan konsekuensi terhadap mata pencaharian masyarakat terdampak. Penelitian Kahangirwe & Vanclay (2024) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat menyebabkan economic displacement dan gangguan terhadap mata pencaharian. Sementara itu, Wibowo et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan UMKM. Kelompok penelitian tersebut memberikan dasar bahwa pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Kelompok penelitian kedua memberikan dasar untuk memahami implementasi kebijakan. Habsana et al., (2026); Hasanah & Yopan (2026); Susandra et al. (2024) menunjukkan relevansi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan publik. Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik dan mengapa implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara berbeda dari desain awalnya. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas dampak ekonomi pembangunan dan implementasi kebijakan secara terpisah, masih terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam konteks pembangunan jaringan sanitasi perkotaan. Penelitian mengenai dampak pembangunan lebih banyak berfokus pada proyek transportasi atau infrastruktur berskala besar, sedangkan penelitian

implementasi kebijakan umumnya tidak secara khusus menghubungkan implementasi perlindungan dengan kondisi ekonomi pelaku usaha yang mengalami gangguan sementara akibat konstruksi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, posisi penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kuantitatif mengenai tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi pelaku usaha dengan analisis kualitatif mengenai implementasi kebijakan perlindungannya. Penelitian ini menggunakan tingkat gangguan pembangunan SPALD-T sebagai variabel independen (X) dan dampak ekonomi pelaku usaha sebagai variabel dependen (Y). Selanjutnya, implementasi kebijakan perlindungan dianalisis secara kualitatif menggunakan empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dengan posisi tersebut, penelitian ini tidak hanya berusaha menjawab apakah tingkat gangguan pembangunan berkaitan dengan dampak ekonomi pelaku usaha, tetapi juga menjelaskan bagaimana kebijakan perlindungan dilaksanakan dalam merespons dampak tersebut. Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi kontribusi utama penelitian karena memungkinkan fenomena pembangunan SPALD-T dipahami tidak hanya dari sisi besarnya dampak ekonomi, tetapi juga dari perspektif administrasi publik mengenai kapasitas dan proses implementasi kebijakan perlindungan masyarakat terdampak.

Kerangka Berpikir Penelitian

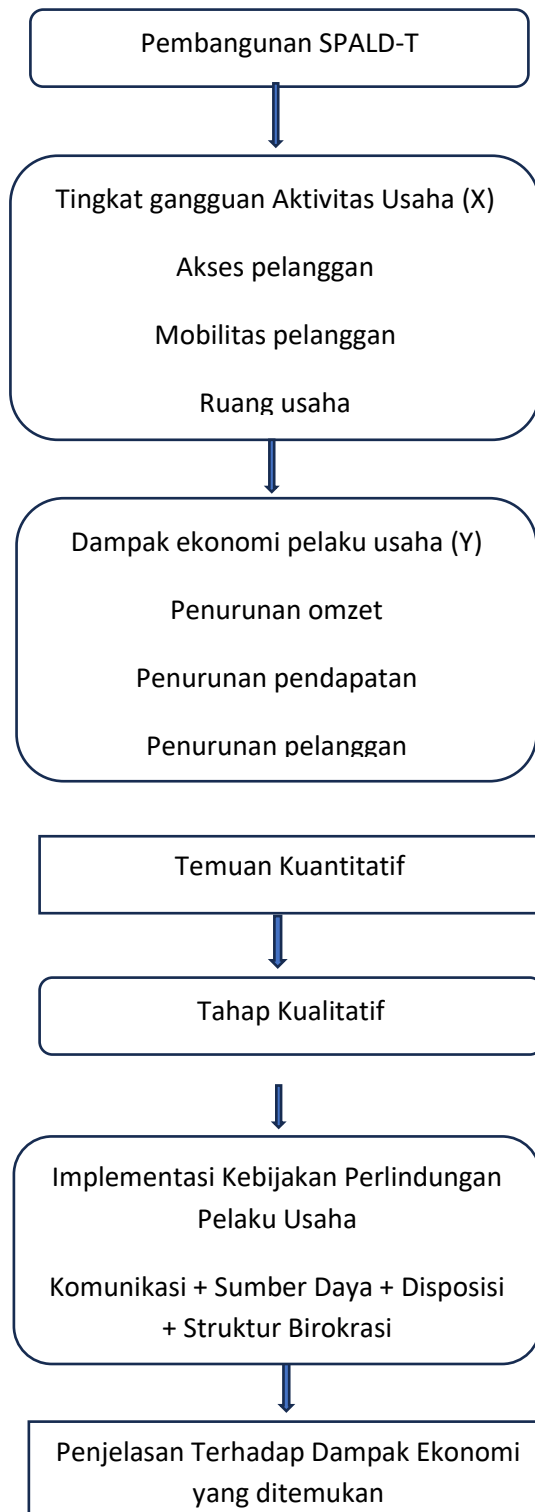
Pembangunan SPALD-T merupakan salah satu bentuk pembangunan infrastruktur publik yang bertujuan meningkatkan pelayanan sanitasi masyarakat. Meskipun memberikan manfaat dalam jangka panjang, proses konstruksi dapat menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Gangguan tersebut dapat berupa terganggunya akses pelanggan, mobilitas, ruang usaha, kelancaran operasional, serta meningkatnya intensitas dan durasi gangguan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Gangguan terhadap aktivitas usaha tersebut secara teoritis dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi pelaku usaha. Gangguan akses dan mobilitas, misalnya, dapat mengurangi kemudahan pelanggan untuk mengunjungi tempat usaha. Kondisi tersebut selanjutnya dapat berpengaruh terhadap jumlah pelanggan, omzet, pendapatan, waktu operasional, maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat gangguan yang dialami, semakin besar kemungkinan pelaku usaha mengalami dampak ekonomi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian kuantitatif menempatkan tingkat gangguan pembangunan SPALD-T sebagai variabel independen (X) dan dampak ekonomi pelaku usaha sebagai variabel dependen (Y). Hubungan kedua variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah tingkat gangguan pembangunan berkaitan dengan besarnya dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha. Namun, hubungan antara gangguan pembangunan dan dampak ekonomi tidak selalu bersifat sederhana. Pelaku usaha dengan tingkat gangguan yang relatif sama dapat mengalami dampak ekonomi yang berbeda karena dipengaruhi oleh karakteristik usaha, ketergantungan terhadap akses lokasi, jumlah pelanggan, kemampuan beradaptasi, serta kondisi operasional masing-masing usaha. Oleh karena itu, hasil analisis kuantitatif perlu dijelaskan lebih lanjut melalui pendekatan kualitatif.

Dalam desain *mixed methods sequential explanatory*, tahap kualitatif digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif yang telah diperoleh. Pada tahap ini, penelitian memfokuskan perhatian pada implementasi kebijakan perlindungan pelaku usaha terdampak pembangunan SPALD-T. Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori Edwards III melalui empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan perlindungan diterapkan, faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta bagaimana respons tersebut berkaitan dengan kondisi pelaku usaha yang mengalami dampak ekonomi.

Secara sederhana, alurnya adalah:



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Perlindungan Pelaku Usaha

Kerangka tersebut sesuai dengan desain *Mixed Methods Sequential Explanatory*, karena penelitian kuantitatif dilaksanakan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran dan hubungan empiris mengenai dampak ekonomi, kemudian penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil kuantitatif tersebut secara lebih mendalam. Dengan

demikian, implementasi kebijakan bukan diposisikan sebagai variabel mediasi secara statistik, melainkan sebagai *explanatory qualitative construct* yang membantu menjawab pertanyaan mengapa tingkat dampak ekonomi tertentu terjadi dan bagaimana pemerintah serta pengelola proyek merespons dampak tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, pembangunan SPALD-T dipandang sebagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas usaha selama proses konstruksi. Gangguan tersebut dapat berupa terganggunya akses pelanggan, mobilitas, ruang usaha, kelancaran operasional, durasi gangguan, dan intensitas kegiatan konstruksi. Kondisi tersebut secara teoritis dapat berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi pelaku usaha, terutama dalam bentuk penurunan omzet, penurunan pendapatan bersih, berkurangnya jumlah pelanggan, kehilangan waktu operasional, peningkatan biaya usaha, dan perubahan jumlah tenaga kerja.

Hubungan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi perlu dibuktikan secara empiris karena tingkat gangguan yang dirasakan oleh pelaku usaha tidak selalu menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sama. Perbedaan karakteristik usaha, tingkat ketergantungan terhadap akses lokasi, kemampuan mempertahankan operasional, serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi konstruksi dapat menyebabkan variasi dampak ekonomi antarpelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah terdapat hubungan antara tingkat gangguan pembangunan SPALD-T dan tingkat dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha. Berdasarkan hubungan teoritis tersebut, pengembangan hipotesis kuantitatif penelitian dirumuskan sebagai berikut.

Hubungan Tingkat Gangguan Pembangunan SPALD-T dengan Dampak Ekonomi Pelaku Usaha

Secara teoritis, semakin tinggi tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas konstruksi terhadap akses dan operasional usaha, semakin besar kemungkinan terjadinya peningkatan dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha. Gangguan terhadap akses pelanggan dapat mengurangi kemudahan konsumen untuk mencapai lokasi usaha, sedangkan gangguan mobilitas dan operasional dapat membatasi kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kegiatan ekonominya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berkaitan dengan penurunan omzet, pendapatan, jumlah pelanggan, maupun perubahan aspek operasional usaha.

Temuan Wibowo et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berkaitan dengan profitabilitas dan keberlanjutan UMKM. Kahangirwe & Vanclay (2024) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat menimbulkan *economic displacement* dan gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, Egze et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan konsekuensi terhadap kondisi penghidupan masyarakat terdampak. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bahwa semakin besar gangguan yang ditimbulkan oleh pembangunan, semakin besar pula kemungkinan munculnya konsekuensi ekonomi bagi masyarakat yang aktivitasnya berada di sekitar lokasi pembangunan. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat gangguan pembangunan SPALD-T berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha di Kota Semarang.

Implementasi Kebijakan Perlindungan sebagai Penjelas Temuan Kuantitatif

Hasil pengujian hubungan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi memberikan gambaran mengenai keterkaitan empiris antara kondisi konstruksi dan konsekuensi ekonomi yang dialami pelaku usaha. Namun, hubungan statistik tersebut belum dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana pelaku usaha dilindungi selama pembangunan berlangsung, bagaimana pelaksana merespons dampak yang muncul, serta faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tahap kualitatif untuk memberikan penjelasan terhadap temuan kuantitatif.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan perlindungan tidak ditempatkan sebagai variabel independen tambahan, variabel intervening, maupun variabel moderasi. Implementasi kebijakan ditempatkan sebagai fokus kualitatif yang bersifat *explanatory*, yaitu digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana kebijakan perlindungan diterapkan dalam merespons dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha.

Penggunaan perspektif Edwards (1980) memungkinkan proses implementasi tersebut dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana informasi mengenai dampak, hak, perlindungan, kompensasi, dan mekanisme pengaduan disampaikan kepada pelaku usaha. Sumber daya digunakan untuk melihat kecukupan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan perlindungan. Disposisi digunakan untuk melihat komitmen, sikap, dan

respons pelaksana terhadap masyarakat terdampak. Sementara itu, struktur birokrasi digunakan untuk melihat kejelasan pembagian tugas, prosedur, kewenangan, dan koordinasi antaraktor dalam melaksanakan perlindungan.

Keempat dimensi tersebut penting karena hubungan antara gangguan pembangunan dan dampak ekonomi tidak hanya berkaitan dengan karakteristik kegiatan konstruksi, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah dan pengelola proyek merespons dampak yang muncul. Gangguan yang berada pada tingkat tertentu dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang berbeda apabila pelaku usaha memperoleh informasi yang memadai, memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan, memperoleh penanganan yang responsif, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, atau prosedur birokrasi dapat menyebabkan respons perlindungan tidak berjalan secara optimal.

Dengan demikian, tahap kualitatif diarahkan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa dampak ekonomi yang ditemukan pada tahap kuantitatif terjadi serta bagaimana implementasi kebijakan perlindungan merespons kondisi tersebut. Temuan kualitatif selanjutnya dibandingkan dan diintegrasikan dengan hasil kuantitatif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak pembangunan SPALD-T terhadap pelaku usaha. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini tidak merumuskan hipotesis statistik kedua, tetapi menggunakan proposisi penelitian sebagai pedoman analisis kualitatif, yaitu:

P1: Implementasi kebijakan perlindungan pelaku usaha terdampak pembangunan SPALD-T dijelaskan melalui kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam merespons dampak ekonomi yang ditemukan pada tahap kuantitatif.

Proposisi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menggali informasi melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif diarahkan untuk mengidentifikasi apakah keempat dimensi implementasi Edwards III telah mendukung perlindungan pelaku usaha atau masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Integrasi Hipotesis Kuantitatif dan Proposisi Kualitatif

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian memiliki dua tahapan analisis yang saling melengkapi. Tahap pertama menguji H1 untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat gangguan pembangunan SPALD-T dan dampak ekonomi pelaku usaha. Tahap kedua menggunakan P1 untuk menjelaskan hasil tersebut melalui analisis implementasi kebijakan perlindungan. Dengan pola tersebut, penelitian tidak berhenti

pada pertanyaan “apakah terdapat hubungan antara gangguan pembangunan dan dampak ekonomi?”, tetapi dilanjutkan dengan pertanyaan “bagaimana implementasi kebijakan perlindungan merespons dampak ekonomi tersebut?”. Integrasi kedua tahap tersebut memungkinkan penelitian memberikan penjelasan yang lebih utuh mengenai kondisi pelaku usaha selama pembangunan SPALD-T. Dengan demikian, posisi masing-masing komponen dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. Posisi Komponen Penelitian dan Metode yang Digunakan

Komponen	Posisi dalam Penelitian	Metode
Tingkat Gangguan Pembangunan SPALD-T	Variabel Independen (X)	Kuantitatif
Dampak Ekonomi Pelaku Usaha	Variabel Dependen (Y)	Kuantitatif
Implementasi Kebijakan Perlindungan	FokusPenjelasan/Explanatory	Kualitatif
Komunikasi	Dimensi Implementasi Kebijakan	Kualitatif
Sumber Daya	Dimensi Implementasi Kebijakan	Kualitatif
Disposisi	Dimensi Implementasi Kebijakan	Kualitatif
Struktur birokrasi	Dimensi Implementasi Kebijakan	Kualitatif

Dengan struktur tersebut, penelitian tidak menempatkan implementasi kebijakan perlindungan sebagai variabel intervening atau variabel moderasi, tetapi sebagai fokus kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Artinya, penelitian terlebih dahulu mengidentifikasi hubungan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi pelaku usaha, kemudian menggali secara kualitatif bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dilaksanakan dalam merespons dampak tersebut. Pola ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjawab “apakah terdapat hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut” antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi pelaku usaha, tetapi juga menjawab “bagaimana dan mengapa” kebijakan perlindungan dilaksanakan dalam menghadapi dampak ekonomi yang muncul selama proses pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain Sequential Explanatory. Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengukur hubungan antara tingkat gangguan pembangunan SPALD-T dan dampak ekonomi pelaku usaha, tetapi juga menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana kebijakan perlindungan ekonomi diimplementasikan terhadap pelaku usaha terdampak. Tahap kuantitatif dilaksanakan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha. Selanjutnya, tahap kualitatif digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif melalui analisis implementasi kebijakan perlindungan ekonomi.

Pada tahap kuantitatif, variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat gangguan pembangunan SPALD-T (X), sedangkan variabel dependen adalah dampak ekonomi pelaku usaha (Y). Tingkat gangguan pembangunan diukur melalui indikator gangguan akses usaha, gangguan mobilitas pelanggan, gangguan ruang usaha, gangguan operasional, durasi gangguan, dan intensitas konstruksi. Sementara itu, dampak ekonomi diukur melalui penurunan omzet, penurunan pendapatan bersih, penurunan jumlah pelanggan, kehilangan waktu operasional, peningkatan biaya usaha, dan perubahan jumlah tenaga kerja.

Populasi penelitian kuantitatif adalah seluruh pelaku usaha yang teridentifikasi terdampak pembangunan jaringan SPALD-T pada lokasi penelitian. Berdasarkan hasil *Detailed Measurement Survey* dan *Socio Economic Survey*, terdapat 76 pelaku usaha terdampak yang tersebar pada lima kecamatan. Karena jumlah populasi relatif terbatas dan seluruh unit telah teridentifikasi, penelitian menggunakan teknik sensus sehingga seluruh pelaku usaha terdampak menjadi responden penelitian. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert untuk memperoleh data mengenai tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi yang dialami responden.

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, tingkat gangguan pembangunan, dan tingkat dampak ekonomi. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antara tingkat gangguan pembangunan SPALD-T dan dampak ekonomi pelaku usaha sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil analisis kuantitatif menjadi dasar dalam menentukan temuan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut pada tahap kualitatif.

Tahap kualitatif diarahkan untuk menjelaskan hasil kuantitatif melalui analisis implementasi kebijakan perlindungan ekonomi pelaku usaha. Implementasi kebijakan tidak ditempatkan sebagai variabel intervening atau moderasi, tetapi sebagai fokus explanatory. Analisis menggunakan empat dimensi teori Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan yang terdiri atas 2 PNS, 4 konsultan, dan 2 kontraktor, serta didukung oleh dokumentasi kebijakan dan dokumen pelaksanaan proyek.

Data kualitatif dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, serta informasi dari pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan perlindungan ekonomi. Integrasi kedua tahap dilakukan pada tahap interpretasi, yaitu dengan menggunakan temuan implementasi kebijakan untuk menjelaskan mengapa tingkat dampak ekonomi tertentu terjadi dan bagaimana pelaksana merespons kondisi pelaku usaha terdampak.

4. HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat gangguan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap aktivitas usaha dan dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha di Kota Semarang, serta memperoleh penjelasan mengenai implementasi kebijakan perlindungan terhadap pelaku usaha terdampak. Sesuai dengan desain *mixed methods sequential explanatory*, tahap kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi kondisi empiris dan hubungan antara tingkat gangguan pembangunan SPALD-T sebagai variabel independen (X) dan dampak ekonomi pelaku usaha sebagai variabel dependen (Y). Tahap kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap temuan kuantitatif melalui empat dimensi implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan ditempatkan sebagai fokus *explanatory* sehingga tidak diposisikan sebagai variabel *intervening* atau *moderator*.

Data kuesioner yang dianalisis terdiri atas 76 responden yang mengisi seluruh butir kuantitatif secara lengkap. Jumlah tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang menggunakan teknik sensus terhadap pelaku usaha terdampak. Instrumen kuantitatif terdiri atas enam pernyataan untuk mengukur tingkat gangguan pembangunan dan enam pernyataan untuk mengukur dampak ekonomi. Pengukuran menggunakan skala Likert. Sementara itu, pertanyaan terbuka mengenai implementasi kebijakan hanya memperoleh jawaban dari delapan responden. Oleh karena itu, temuan kualitatif pada bagian ini digunakan sebagai informasi deskriptif untuk menjelaskan temuan kuantitatif dan tidak diperlakukan sebagai ukuran statistik yang mewakili seluruh responden.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa 52 orang atau 68,42 persen berjenis kelamin laki-laki dan 24 orang atau 31,58 persen berjenis kelamin perempuan. Dari sisi pendidikan, 22 responden atau 28,95 persen berpendidikan SD, 16 responden atau 21,05 persen berpendidikan SMP, 29 responden atau 38,16 persen berpendidikan SMA, lima responden atau 6,58 persen berpendidikan D4, dan empat responden atau 5,26 persen berpendidikan S1. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh

pelaku usaha dengan pendidikan SMA, sedangkan pendidikan tinggi D4 dan S1 memiliki proporsi yang lebih kecil.

Tabel 2. Karakteristik Sociodemografis dan Jenis Usaha Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	52	68,42
	Perempuan	24	31,58
	Total	76	100,00
Pendidikan	SD	22	28,95
	SMP	16	21,05
	SMA	29	38,16
	D4	5	6,58
	S1	4	5,26
	Total	76	100,00
Jenis Usaha	Makanan dan Minuman	35	46,05
	Jasa	10	13,16
	Sembako	6	7,89
	Elektronik	5	6,58
	Kelontong	3	3,95
	Pakaian/Sepatu	3	3,95
	Lainnya	14	18,42
	Total	76	100,00

Berdasarkan Tabel 1, kelompok makanan dan minuman merupakan jenis usaha yang paling banyak menjadi responden, yaitu 35 pelaku usaha atau 46,05 persen. Kelompok jasa berjumlah 10 pelaku usaha atau 13,16 persen, sembako enam pelaku usaha atau 7,89 persen, elektronik lima pelaku usaha atau 6,58 persen, kelontong tiga pelaku usaha atau 3,95 persen, pakaian atau sepatu tiga pelaku usaha atau 3,95 persen, dan kategori lainnya 14 pelaku usaha atau 18,42 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dampak pembangunan dialami oleh pelaku usaha dengan karakteristik kegiatan ekonomi yang beragam, meskipun usaha makanan dan minuman merupakan kelompok yang paling dominan.

Hasil Pengukuran Tingkat Gangguan Pembangunan SPALD-T

Berdasarkan Tabel 2, nilai rata-rata keseluruhan tingkat gangguan pembangunan SPALD-T adalah 3,14 dan berada pada kategori sedang. Indikator dengan rata-rata tertinggi adalah gangguan kelancaran operasional sebesar 4,00 (kategori tinggi), diikuti oleh gangguan mobilitas pelanggan sebesar 3,75 (kategori tinggi), sementara indikator dengan rata-rata terendah adalah gangguan ruang usaha sebesar 1,99 (kategori rendah). Pola ini menunjukkan bahwa gangguan yang paling dirasakan pelaku usaha bersifat nonfisik, yaitu terganggunya kelancaran operasional dan mobilitas pelanggan, dibandingkan gangguan terhadap ruang usaha secara fisik. Pola serupa juga ditemukan dalam penelitian Wulandari & Effendi (2022) mengenai dampak pembangunan Jembatan Sei Alalak terhadap pedagang di sekitar proyek, yang menemukan bahwa selama masa

konstruksi jumlah pembeli menurun drastis dan saluran distribusi barang kerap terhambat, sehingga pendapatan pedagang ikut menurun secara keseluruhan. Kesamaan pola ini memperkuat pemahaman bahwa dalam proyek infrastruktur yang mengganggu akses dan kelancaran distribusi—baik berupa jembatan, jalan, maupun saluran bawah tanah seperti SPALD-T—hambatan terhadap kelancaran aktivitas usaha cenderung lebih dominan dibandingkan hambatan terhadap ruang usaha itu sendiri.

Tabel 3. Tingkat Gangguan Pembangunan SPALD-T

No.	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Gangguan akses pelanggan	3,28	Sedang
2	Gangguan mobilitas pelanggan	3,75	Tinggi
3	Gangguan ruang usaha	1,99	Rendah
4	Gangguan kelancaran operasional	4,00	Tinggi
5	Durasi gangguan	2,63	Sedang
6	Intensitas konstruksi	3,21	Sedang
	Rata-rata variabel	3,14	Sedang

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SPALD-T menimbulkan gangguan yang cukup nyata terhadap aktivitas usaha, tetapi gangguan tersebut belum mencapai tingkat yang menyebabkan terhentinya kegiatan ekonomi secara umum. Kategori sedang mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih dapat mempertahankan aktivitas usahanya meskipun menghadapi perubahan akses, mobilitas pelanggan, kondisi lingkungan sekitar, maupun keterbatasan ruang usaha selama konstruksi berlangsung. Kondisi ini sejalan dengan temuan Tyas & Kholifah (2025) dalam kajian dampak kebijakan pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi terhadap keberlangsungan UMKM di Kraksaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak konstruksi terhadap pelaku usaha tidak bersifat seragam: sebagian usaha mengalami penurunan jumlah pelanggan dan omzet akibat perubahan aksesibilitas serta pengalihan arus lalu lintas, sementara sebagian lain justru memperoleh manfaat sementara dari peningkatan aktivitas selama masa konstruksi berlangsung. Variasi dampak semacam ini memperkuat pemahaman bahwa gangguan pembangunan tidak serta-merta menghentikan roda ekonomi pelaku usaha secara menyeluruh, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk tekanan terhadap operasional usaha yang intensitasnya berbeda-beda antarpelaku usaha, bergantung pada karakteristik dan posisi usaha masing-masing terhadap proyek pembangunan.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberadaan gangguan fisik pembangunan tidak dengan sendirinya mencerminkan besarnya kerugian ekonomi yang dialami pelaku usaha. Tingkat gangguan menggambarkan intensitas hambatan yang

dirasakan, sedangkan konsekuensi ekonominya bergantung pada kemampuan masing-masing usaha dalam mempertahankan kegiatan operasional di tengah kondisi tersebut. Prinsip ini sejalan dengan temuan Medhi et al. (2023) dalam konteks pembangunan Jalan Tol Bangkinang–Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari suatu proyek infrastruktur tidak seragam bagi seluruh pelaku usaha, melainkan bergantung pada posisi dan karakteristik usaha masing-masing terhadap sumber gangguan. Meskipun mekanisme gangguan pada kasus tersebut berbeda dari SPALD-T—di mana perubahan akses bersifat permanen akibat pengalihan rute, sementara gangguan SPALD-T bersifat sementara selama masa konstruksi—prinsip dasarnya tetap relevan: intensitas gangguan yang serupa dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berbeda tergantung pada faktor internal maupun eksternal yang melekat pada masing-masing usaha. Perbedaan karakteristik usaha, kemampuan adaptasi, tingkat ketergantungan terhadap akses lokasi, serta kapasitas usaha dalam mengantisipasi gangguan pada akhirnya menjadi faktor penentu mengapa tingkat gangguan yang relatif sama dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang berbeda antarpelaku usaha. Aspek inilah yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Pelaku Usaha

Dampak ekonomi merupakan salah satu konsekuensi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan SPALD-T karena kegiatan konstruksi berlangsung pada ruang yang juga digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini, dampak ekonomi diukur melalui enam indikator, yaitu penurunan omzet, penurunan pendapatan bersih, penurunan jumlah pelanggan, kehilangan waktu operasional, peningkatan biaya usaha, dan perubahan jumlah tenaga kerja. Pengukuran terhadap keenam indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat konsekuensi ekonomi yang dialami pelaku usaha selama pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4. Dampak Ekonomi Pelaku Usaha

No.	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Penurunan omzet	2,71	Sedang
2	Penurunan pendapatan bersih	2,71	Sedang
3	Penurunan jumlah pelanggan	2,33	Rendah
4	Kehilangan waktu operasional	2,03	Rendah
5	Peningkatan biaya usaha	2,00	Rendah
6	Perubahan jumlah tenaga kerja	1,05	Sangat rendah
	Rata-rata variabel	2,14	Rendah

Analisis terhadap dimensi dampak ekonomi menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi memberikan konsekuensi yang berbeda pada setiap indikator ekonomi pelaku usaha. Penurunan omzet dan penurunan pendapatan bersih memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 2,71 dan termasuk dalam kategori sedang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi ekonomi yang paling nyata dirasakan oleh pelaku usaha berkaitan dengan penerimaan finansial secara langsung. Penurunan jumlah pelanggan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,33 dan berada pada kategori rendah. Sementara itu, kehilangan waktu operasional dan peningkatan biaya usaha masing-masing memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,03 dan 2,00, yang berada pada kategori rendah. Perubahan jumlah tenaga kerja memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu sebesar 1,05 dan termasuk kategori sangat rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mempertahankan jumlah tenaga kerja selama berlangsungnya pembangunan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak ekonomi pembangunan SPALD-T lebih banyak dirasakan melalui penurunan penerimaan usaha daripada melalui perubahan struktur usaha. Nilai penurunan omzet dan pendapatan bersih yang relatif lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya menunjukkan bahwa gangguan konstruksi terutama berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan tingkat penerimaan selama proses pembangunan. Sebaliknya, rendahnya nilai perubahan jumlah tenaga kerja menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi belum mendorong sebagian besar pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tenaga kerja secara signifikan. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha cenderung muncul pada aspek penerimaan dan aktivitas operasional, sedangkan keberlangsungan usaha dan struktur tenaga kerja relatif masih dapat dipertahankan.

Perbedaan nilai pada setiap indikator juga menunjukkan bahwa konsekuensi pembangunan tidak bersifat seragam pada seluruh aspek kegiatan usaha. Penurunan omzet dan pendapatan bersih berada pada kategori sedang, sedangkan penurunan jumlah pelanggan, kehilangan waktu operasional, dan peningkatan biaya usaha berada pada kategori rendah. Pola tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang dialami pelaku usaha lebih terlihat pada hasil akhir kegiatan ekonomi berupa penerimaan daripada pada perubahan langsung terhadap proses operasional dan tenaga kerja. Oleh karena itu, dampak ekonomi dalam penelitian ini tidak tepat dipahami hanya sebagai kehilangan

usaha atau penghentian kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai penurunan kemampuan usaha dalam mempertahankan tingkat penerimaan selama berlangsungnya konstruksi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Egze et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan konsekuensi terhadap penghidupan masyarakat terdampak. Penelitian Kahangirwe & Vanclay (2024) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan economic displacement dan gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, Wibowo et al., (2024) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan usaha sehingga diperlukan strategi mitigasi terhadap dampak yang muncul. Kesamaan temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan manfaat publik dalam jangka panjang, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi selama proses pelaksanaannya, terutama melalui perubahan penerimaan, pelanggan, aktivitas operasional, dan keberlanjutan usaha.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam tingkat dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha. Rata-rata dampak ekonomi berada pada kategori rendah dengan nilai 2,14, sedangkan tingkat gangguan pembangunan berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat gangguan pembangunan dan tingkat dampak ekonomi tidak selalu berada pada kategori yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi konsekuensi ekonomi yang dialami pelaku usaha selama berlangsungnya pembangunan. Dalam konteks pembangunan SPALD-T, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar aspek kegiatan usaha masih relatif dapat dipertahankan selama proses konstruksi. Hal tersebut tercermin dari rendahnya perubahan jumlah tenaga kerja dan relatif rendahnya kehilangan waktu operasional. Dengan demikian, dampak pembangunan dalam penelitian ini lebih banyak berupa tekanan terhadap penerimaan usaha selama masa konstruksi daripada penghentian kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Rendahnya rata-rata dampak ekonomi tidak berarti bahwa pembangunan SPALD-T tidak menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi pelaku usaha. Nilai rata-rata sebesar 2,14 menunjukkan bahwa intensitas dampak secara keseluruhan berada pada kategori rendah, tetapi beberapa indikator menunjukkan tingkat dampak yang lebih tinggi. Penurunan omzet dan pendapatan bersih, misalnya, masing-masing berada pada kategori sedang dengan nilai 2,71. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai agregat variabel perlu dibaca bersama dengan variasi antarindikator. Rendahnya rata-rata dampak

ekonomi secara agregat berkaitan dengan adanya perbedaan intensitas dampak antarindikator. Tekanan yang relatif lebih tinggi terhadap penerimaan usaha tidak disertai dengan perubahan yang sama besar pada jumlah tenaga kerja, waktu operasional, dan biaya usaha. Dengan demikian, dampak ekonomi bersifat heterogen dan tidak seluruh aspek kegiatan usaha mengalami tekanan dengan intensitas yang sama.

Temuan tersebut juga memperkuat pemahaman mengenai economic displacement yang digunakan dalam penelitian ini. Economic displacement tidak selalu ditandai dengan kehilangan tempat usaha atau penghentian kegiatan ekonomi secara permanen, tetapi dapat terjadi melalui gangguan terhadap akses, sumber pendapatan, pelanggan, dan aktivitas usaha selama pembangunan berlangsung. Dalam konteks SPALD-T, pelaku usaha masih dapat menjalankan kegiatan usahanya, tetapi menghadapi tekanan terhadap penerimaan akibat perubahan kondisi lingkungan usaha selama konstruksi. Oleh karena itu, dampak ekonomi perlu dipahami sebagai proses yang dapat berlangsung secara sementara dan bertahap, bukan semata-mata sebagai kehilangan usaha secara permanen. Pemahaman tersebut menjelaskan mengapa dampak terhadap penerimaan dapat berada pada tingkat sedang, sementara perubahan jumlah tenaga kerja dan aspek operasional lainnya tetap berada pada tingkat rendah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak ekonomi pembangunan SPALD-T berada pada kategori rendah pada tingkat agregat, tetapi memiliki variasi pada setiap aspek kegiatan usaha. Dampak paling nyata terlihat pada penurunan omzet dan pendapatan bersih, sedangkan perubahan jumlah tenaga kerja merupakan dampak yang paling rendah. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih dapat mempertahankan keberlangsungan kegiatan usaha meskipun menghadapi gangguan selama proses konstruksi. Namun, tekanan terhadap penerimaan usaha tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kondisi ekonominya selama pembangunan berlangsung.

Variasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya dampak ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari tingkat dampak secara agregat, tetapi juga perlu dikaitkan dengan tingkat gangguan pembangunan yang dialami oleh pelaku usaha. Secara konseptual, semakin tinggi gangguan terhadap akses, mobilitas, ruang usaha, dan operasional, semakin besar kemungkinan terjadinya tekanan terhadap penerimaan usaha. Namun, hubungan tersebut perlu dibuktikan secara empiris untuk mengetahui sejauh mana tingkat gangguan pembangunan berkaitan dengan variasi dampak ekonomi. Oleh karena itu, analisis

selanjutnya menguji hubungan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi melalui korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan regresi linear sederhana.

Analisis Hubungan Tingkat Gangguan dan Dampak Ekonomi

Pengantar Uji Hubungan

Setelah tingkat gangguan pembangunan SPALD-T dan dampak ekonomi pelaku usaha dianalisis secara terpisah pada dua subbagian sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menguji apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna secara statistik. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa gangguan yang dirasakan pelaku usaha selama masa konstruksi terutama pada dimensi kelancaran operasional dan mobilitas pelanggan yang berkategori tinggi benar-benar berkontribusi terhadap perubahan kondisi ekonomi mereka, bukan sekadar terjadi secara kebetulan atau tanpa keterkaitan yang jelas.

Hasil Uji Korelasi dan Regresi

Berdasarkan Tabel 4, analisis korelasi Pearson menghasilkan koefisien $r = 0,557$ dengan $p < 0,001$, sedangkan korelasi Spearman menghasilkan $\rho = 0,552$ dengan $p < 0,001$. Kedua pengujian menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat gangguan pembangunan yang dialami pelaku usaha, semakin tinggi pula dampak ekonomi yang dilaporkan. Konsistensi hasil Pearson dan Spearman memperkuat temuan bahwa hubungan kedua variabel bukan sekadar pola yang muncul dari satu metode pengujian, melainkan konsisten meskipun diuji dengan pendekatan parametrik maupun non-parametrik.

Tabel 5. Ringkasan Pengujian Hubungan Tingkat Gangguan Pembangunan (X) terhadap Dampak Ekonomi (Y)

Analisis	Koefisien	Sig.	Interpretasi
Pearson	0,557	< 0,001	Hubungan positif dan signifikan
Spearman	0,552	< 0,001	Hubungan positif dan signifikan
Regresi sederhana (R^2)	0,311	< 0,001	Model signifikan

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dirangkum pada Tabel 4, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,198 + 1,062X$$

Persamaan ini menunjukkan adanya hubungan searah (positif) antara tingkat gangguan pembangunan SPALD-T (X) terhadap dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha (Y). Koefisien regresi sebesar 1,062 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan satu satuan pada tingkat gangguan pembangunan diikuti oleh peningkatan dampak ekonomi sebesar 1,062 satuan.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,311 menunjukkan bahwa sebesar 31,1% variasi pada dampak ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi tingkat gangguan pembangunan. Sementara itu, sisanya sebesar 68,9 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti karakteristik usaha, kemampuan adaptasi, tingkat ketergantungan terhadap akses lokasi, dan kapasitas masing-masing pelaku usaha dalam mengantisipasi gangguan selama masa konstruksi berlangsung. Berdasarkan hasil analisis tersebut, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa tingkat gangguan pembangunan SPALD-T berhubungan positif dengan dampak ekonomi pelaku usaha dinyatakan diterima.

Kesenjangan antara Tingkat Gangguan dan Tingkat Dampak Ekonomi

Meskipun hubungan antara kedua variabel terbukti positif dan signifikan, perlu dicermati bahwa rata-rata tingkat gangguan pembangunan berada pada kategori sedang (3,14), sedangkan rata-rata dampak ekonomi yang benar-benar dirasakan pelaku usaha berada pada kategori rendah (2,14). Kesenjangan ini bukan bentuk kontradiksi, melainkan konsisten dengan nilai R^2 sebesar 0,311, yang menunjukkan bahwa tingkat gangguan pembangunan hanya menjelaskan sebagian dari variasi dampak ekonomi, sementara sebagian besar variasi lainnya ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal pelaku usaha. Dengan demikian, gangguan pembangunan lebih banyak menimbulkan tekanan pada sisi omzet dan pendapatan dibandingkan mengancam kelangsungan usaha secara struktural, seperti pengurangan tenaga kerja.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Kuantitatif

Hipotesis	Dasar Pengujian	Hasil	Keputusan
H1: Tingkat gangguan pembangunan SPALD-T berhubungan positif dengan dampak ekonomi pelaku usaha	Korelasi Pearson dan regresi linear sederhana	$r = 0,557$; $p < 0,001$; $R^2 = 0,311$	Didukung

Simpulan Analisis Hubungan Kuantitatif

Secara keseluruhan, hasil analisis hubungan ini memberikan tiga kesimpulan penting. Pertama, tingkat gangguan pembangunan SPALD-T dan dampak ekonomi pelaku usaha memiliki hubungan positif yang signifikan secara statistik, sehingga peningkatan gangguan pembangunan cenderung diikuti oleh peningkatan dampak ekonomi negatif yang dirasakan pelaku usaha. Kedua, kekuatan hubungan tersebut tergolong sedang dan proporsi variasi yang dijelaskan oleh model (31,1 persen) masih terbatas, sehingga terbuka ruang bagi faktor-faktor lain yang turut membentuk dampak

ekonomi pelaku usaha di luar tingkat gangguan pembangunan itu sendiri. Ketiga, meskipun hubungan kedua variabel signifikan, tingkat dampak ekonomi yang benar-benar terealisasi secara agregat tergolong rendah, yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha pada umumnya masih mampu menyerap tekanan gangguan tanpa harus mengurangi skala usaha secara drastis.

Temuan kuantitatif ini selanjutnya menjadi dasar bagi analisis kualitatif pada bagian berikutnya, yang akan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan terhadap pelaku usaha terdampak berperan dalam merespons kondisi tersebut, ditinjau melalui empat dimensi implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan

Gambaran Umum Temuan Kualitatif

Pertanyaan terbuka mengenai implementasi kebijakan perlindungan memperoleh jawaban dari delapan responden. Jumlah jawaban tersebut lebih kecil daripada jumlah responden kuantitatif, sehingga hasilnya tidak diperlakukan sebagai ukuran statistik yang mewakili seluruh responden, melainkan sebagai data eksploratif yang berfungsi menjelaskan (elaborasi) pola-pola yang telah ditemukan pada tahap kuantitatif. Jawaban tersebut memberikan gambaran mengenai pengalaman dan persepsi pelaku usaha terhadap implementasi kebijakan perlindungan, yang ditinjau melalui empat dimensi implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa informasi perlindungan telah disampaikan melalui sosialisasi, survei langsung, komunikasi berkelanjutan, dan media sosial. Sebagian jawaban menilai informasi sudah cukup jelas, sedangkan jawaban lainnya menekankan perlunya pembaruan informasi secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan, tetapi konsistensi dan pemastian pemahaman pelaku usaha tetap menjadi kebutuhan.

Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, terdapat jawaban yang menyatakan bahwa jumlah dan kompetensi petugas sudah memadai. Namun, pada aspek anggaran terdapat responden yang menyatakan tidak mengetahui kecukupan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya dari sisi internal pelaksana belum tentu dipahami oleh kelompok sasaran. Ketersediaan data pelaku usaha dipandang penting karena dapat

menjadi dasar penentuan perlindungan, pengaturan metode pekerjaan, penjagaan akses, dan tindak lanjut keluhan.

Disposisi

Dari sisi disposisi, jawaban menunjukkan adanya komitmen pelaksana untuk meminimalkan gangguan, menjaga akses usaha, berkoordinasi, dan menindaklanjuti keluhan. Namun, adanya jawaban tidak tahu pada beberapa pertanyaan menunjukkan bahwa komitmen pelaksana belum selalu terlihat secara jelas oleh seluruh pelaku usaha. Hal tersebut menegaskan bahwa disposisi perlu diwujudkan melalui tindakan yang konsisten dan dapat diamati oleh kelompok sasaran.

Struktur Birokrasi

Sementara itu, struktur birokrasi terdapat jawaban yang menggambarkan pembagian peran antara pemilik proyek atau PIU, konsultan, kontraktor, dan pelaku usaha. Prosedur identifikasi, penanganan, dan perlindungan juga dinilai tersedia. Akan tetapi, sebagian responden tidak mengetahui secara jelas mengenai kewenangan dan prosedur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyederhanaan komunikasi mengenai siapa yang harus dihubungi, bagaimana keluhan disampaikan, bagaimana verifikasi dilakukan, dan bagaimana tindak lanjut diberikan.

Simpulan Temuan Kualitatif

Secara keseluruhan, temuan kualitatif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan telah memiliki perangkat dasar berupa komunikasi, data, mekanisme keluhan, pembagian tugas, dan prosedur. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman pada sebagian responden. Kesenjangan tersebut penting karena keberhasilan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen, tetapi juga oleh kemampuan kelompok sasaran memahami dan mengakses instrumen tersebut, sekaligus memberikan penjelasan atas variasi dampak ekonomi yang ditemukan pada tahap kuantitatif.

5. PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan SPALD-T mempunyai dua sisi yang perlu dibaca secara bersamaan. Pada satu sisi, pembangunan merupakan intervensi publik untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dan kualitas lingkungan. Pada sisi lain, proses konstruksi berlangsung pada ruang yang juga digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terselesaikannya pekerjaan fisik, tetapi juga dari kemampuan

pemerintah dan pengelola proyek mengelola konsekuensi sosial ekonomi yang muncul selama pelaksanaan. Perspektif tersebut sejalan dengan kerangka penelitian yang menempatkan gangguan akses, mobilitas, ruang usaha, operasional, durasi, dan intensitas konstruksi sebagai dimensi penting dampak pembangunan.

Rata-rata tingkat gangguan pembangunan sebesar 3,14 menunjukkan bahwa responden mengalami gangguan pada tingkat sedang. Gangguan terhadap akses pelanggan, mobilitas, dan operasional menjadi aspek penting karena ketiga aspek tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan usaha mempertahankan kegiatan ekonominya. Ketika pekerjaan konstruksi mengubah pola akses atau mengurangi kelancaran pergerakan di sekitar tempat usaha, pelaku usaha harus melakukan penyesuaian agar kegiatan tetap berlangsung. Dengan demikian, gangguan konstruksi perlu dipahami sebagai perubahan kondisi operasional yang dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, meskipun tempat usaha secara fisik tetap berada pada lokasi yang sama.

Temuan tersebut memperkuat konsep economic displacement yang digunakan dalam penelitian. Economic displacement tidak selalu berarti kehilangan aset atau tempat usaha secara permanen. Gangguan terhadap akses, sumber pendapatan, atau sarana penghidupan selama proyek berlangsung juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi. Dalam konteks SPALD-T, pelaku usaha dapat tetap membuka usahanya, tetapi menghadapi akses pelanggan yang lebih sulit, ruang gerak yang lebih terbatas, atau operasional yang kurang lancar. Oleh karena itu, penilaian dampak perlu memperhatikan kondisi sementara selama konstruksi, bukan hanya perubahan permanen setelah proyek selesai.

Hubungan positif antara tingkat gangguan dan dampak ekonomi memberikan dukungan empiris terhadap hipotesis H1. Koefisien Pearson sebesar 0,557 tergolong dalam kategori korelasi sedang, bukan kuat. Kekuatan hubungan yang sedang ini secara analitis penting untuk dibaca: gangguan konstruksi memang secara konsisten diikuti oleh dampak ekonomi, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat deterministik. Artinya, tingkat gangguan yang sama pada dua pelaku usaha berbeda tidak selalu menghasilkan dampak ekonomi yang setara. Pola ini sejalan dengan argumen Esteves (2021) bahwa economic displacement bersifat heterogen dan bergantung pada karakteristik unit usaha yang terdampak, bukan semata-mata pada intensitas gangguan itu sendiri.

Nilai R^2 sebesar 0,311 memperkuat pembacaan tersebut: 68,9% variasi dampak ekonomi berasal dari faktor di luar model. Ada beberapa kandidat variabel yang secara

teoretis relevan untuk menjelaskan sisa variasi ini, meskipun tidak diuji secara statistik dalam penelitian ini: (1) jenis usaha dan ketergantungan terhadap pelanggan yang datang langsung (*walk-in customer*). Berdasarkan Tabel 1, usaha makanan dan minuman mendominasi sampel (46,05%). Usaha jenis ini umumnya lebih bergantung pada visibilitas dan aksesibilitas fisik dibanding, misalnya, usaha jasa yang pelanggannya dapat membuat janji terlebih dahulu. Perbedaan struktur permintaan ini masuk akal sebagai sumber variasi dampak yang tidak tertangkap oleh pengukuran gangguan konstruksi secara umum; (2) skala usaha dan cadangan modal kerja. Pelaku usaha dengan skala lebih besar cenderung memiliki bantalan finansial untuk menyerap penurunan omzet sementara, sedangkan usaha mikro dengan arus kas harian lebih rentan mengalami dampak yang proporsional lebih besar terhadap gangguan yang sama; (3) kapasitas adaptasi operasional, misalnya kemampuan beralih ke penjualan daring, pengiriman, atau penyesuaian jam operasional. Kapasitas ini kemungkinan berkorelasi dengan tingkat pendidikan atau usia usaha, yang datanya sudah tersedia pada Tabel 1 tetapi belum dihubungkan dengan variabel dampak ekonomi; dan (4) lokasi spesifik dalam koridor konstruksi, karena pelaku usaha yang berada tepat di titik pengerjaan aktif kemungkinan mengalami dampak berbeda dari yang berada di ujung koridor yang sama. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa kerangka *economic displacement* tidak cukup dijelaskan oleh satu prediktor tunggal berupa intensitas gangguan konstruksi; ia memerlukan model yang memperhitungkan karakteristik unit usaha sebagai moderator atau prediktor tambahan. Implikasinya terhadap desain kebijakan bersifat langsung: skema kompensasi yang seragam berisiko tidak proporsional pelaku usaha dengan karakteristik rentan (skala mikro, sangat bergantung pada pelanggan yang datang langsung, kapasitas adaptasi rendah) berpotensi kurang terkompensasi meski tingkat gangguan yang dialami sama dengan pelaku usaha lain yang lebih resilien. Hal ini memberikan dasar argumentatif bagi rekomendasi bahwa mekanisme perlindungan sebaiknya mempertimbangkan segmentasi kerentanan pelaku usaha, bukan hanya tingkat gangguan konstruksi sebagai satu-satunya basis penentuan bentuk perlindungan.

Perbedaan antara rata-rata tingkat gangguan (3,14, kategori sedang) dan rata-rata dampak ekonomi (2,14, kategori rendah) memperkuat pembacaan di atas. Selisih ini bukan sekadar informasi deskriptif, melainkan indikasi adanya faktor peredam (*buffering factor*) di tingkat pelaku usaha individual — kemungkinan berupa strategi adaptif seperti penyesuaian jam operasional atau perubahan pola layanan yang menjelaskan mengapa gangguan operasional tidak secara linear diteruskan menjadi kerugian ekonomi.

Penelitian lanjutan atau data tambahan mengenai strategi adaptasi yang digunakan pelaku usaha akan memperkuat penjelasan mekanisme ini, dan sebaiknya dicatat sebagai keterbatasan penelitian yang eksplisit.

Pada aspek kebijakan, hasil kualitatif memperlihatkan bahwa komunikasi merupakan unsur yang sangat penting. Beberapa responden menyebutkan sosialisasi, survei langsung, komunikasi berkelanjutan, dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi. Temuan ini sesuai dengan Edwards III yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang jelas membantu kelompok sasaran memahami hak, bentuk perlindungan, mekanisme keluhan, dan pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jawaban tidak tahu pada beberapa pertanyaan menunjukkan bahwa informasi yang tersedia secara administratif belum tentu diterima dan dipahami secara merata.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan perbedaan antara komunikasi administratif dan komunikasi yang efektif. Komunikasi administratif berfokus pada penyampaian informasi, sedangkan komunikasi kebijakan yang efektif menuntut adanya pemahaman kelompok sasaran. Karena itu, keberhasilan sosialisasi perlu dilihat dari kemampuan pelaku usaha memahami kembali hak dan mekanisme perlindungan. Strategi komunikasi dapat diperkuat melalui informasi berkala, bahasa yang sederhana, kontak pengaduan yang mudah diakses, serta umpan balik untuk memastikan informasi telah diterima dan dipahami.

Dimensi sumber daya juga mempunyai arti penting. Pelaksanaan perlindungan memerlukan petugas yang memahami kondisi sosial ekonomi pelaku usaha, data yang akurat, anggaran yang memadai, kewenangan yang jelas, dan sarana penanganan keluhan. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian menilai petugas sudah memadai, sedangkan sebagian lainnya tidak mengetahui mengenai anggaran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kecukupan sumber daya internal tidak selalu identik dengan persepsi kelompok sasaran. Dari sudut pandang implementasi, sumber daya harus tersedia sekaligus mampu menghasilkan tindakan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dimensi disposisi menunjukkan bahwa komitmen pelaksana merupakan faktor yang menentukan kualitas perlindungan. Jawaban yang menyebutkan upaya menjaga akses, meminimalkan gangguan, melakukan koordinasi, dan menindaklanjuti keluhan memperlihatkan adanya orientasi perlindungan. Namun, jawaban tidak tahu dari sebagian responden menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum seluruhnya terlihat. Dalam

kerangka Edwards III, disposisi perlu diwujudkan melalui tindakan yang konsisten, responsif, dan sesuai ketentuan. Komitmen tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus terlihat dalam perilaku pelaksana ketika menghadapi masalah konkret.

Struktur birokrasi menjadi penting karena pembangunan SPALD-T melibatkan banyak aktor. Pemerintah, pengelola proyek, konsultan, kontraktor, dan masyarakat memiliki peran berbeda. Pembagian tugas yang jelas dapat mencegah tumpang tindih tanggung jawab dan mempercepat penyelesaian masalah. Jawaban terbuka menunjukkan bahwa peran PIU, konsultan, kontraktor, dan masyarakat telah dapat dijelaskan oleh responden. Namun, adanya jawaban tidak tahu mengenai kewenangan dan prosedur memperlihatkan bahwa struktur tersebut belum sepenuhnya dipahami kelompok sasaran. Karena itu, prosedur perlindungan perlu dikomunikasikan secara praktis melalui alur penanganan keluhan yang sederhana.

Temuan mengenai mekanisme keluhan memperlihatkan bahwa perlindungan ekonomi tidak berhenti pada pemberian kompensasi. Mekanisme keluhan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan gangguan dan memberi kesempatan kepada pelaksana melakukan verifikasi serta tindakan perbaikan. Jawaban terbuka menggambarkan proses penerimaan keluhan, pencatatan, verifikasi lapangan, koordinasi, dan tindak lanjut. Mekanisme tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi implementasi karena informasi dari masyarakat dapat digunakan untuk mengetahui apakah langkah mitigasi telah berjalan sesuai kondisi lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menguatkan posisi implementasi kebijakan perlindungan sebagai explanatory focus dalam desain sequential explanatory. Temuan kuantitatif menjawab apakah terdapat hubungan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi, sedangkan temuan kualitatif membantu menjelaskan bagaimana proses perlindungan dijalankan. Pola tersebut sesuai dengan tujuan mixed methods yang digunakan. Implementasi kebijakan tidak perlu dipaksakan menjadi variabel statistik tambahan karena perannya adalah menjelaskan proses, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang berada di balik temuan kuantitatif.

Implikasi penelitian bagi administrasi publik adalah perlunya memperkuat kapasitas pemerintah dan pengelola proyek dalam mengintegrasikan perlindungan sosial ke dalam manajemen pembangunan. Perlindungan ekonomi perlu dipandang sebagai bagian dari kualitas implementasi kebijakan, bukan sebagai kegiatan tambahan setelah dampak terjadi. Identifikasi pelaku usaha, pemutakhiran data, konsultasi, komunikasi, mitigasi, mekanisme keluhan, dan pemantauan dampak perlu dilakukan secara

berkelanjutan. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan responsivitas kebijakan sekaligus mengurangi kesenjangan antara desain kebijakan dan pengalaman masyarakat.

Pada akhirnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan SPALD-T dapat memberikan manfaat publik yang penting, tetapi proses pelaksanaannya perlu disertai pengelolaan dampak ekonomi secara proporsional. Hubungan positif antara gangguan pembangunan dan dampak ekonomi menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kondisi usaha selama konstruksi. Sementara itu, hasil kualitatif menunjukkan bahwa kualitas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menentukan kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan perlindungan menjadi tindakan yang dirasakan oleh pelaku usaha. Keberhasilan pembangunan SPALD-T karena itu perlu dipahami sebagai keberhasilan menyelesaikan infrastruktur sekaligus menjaga agar kelompok masyarakat yang terdampak sementara memperoleh perlindungan yang memadai.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat gangguan pembangunan SPALD-T terhadap aktivitas usaha berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 3,14. Gangguan paling menonjol terjadi pada kelancaran operasional dan mobilitas pelanggan, sedangkan gangguan terhadap ruang usaha relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak konstruksi lebih banyak berupa gangguan terhadap kondisi operasional daripada perubahan fisik tempat usaha.

Dampak ekonomi pelaku usaha berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 2,14. Penurunan omzet dan pendapatan bersih merupakan dampak yang paling menonjol, sedangkan perubahan jumlah tenaga kerja berada pada tingkat paling rendah. Dengan demikian, pembangunan SPALD-T lebih banyak menimbulkan tekanan terhadap penerimaan usaha selama konstruksi daripada menghentikan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat gangguan pembangunan dan dampak ekonomi, dengan nilai Pearson $r = 0,557$ dan $p < 0,001$. Nilai $R^2 = 0,311$ menunjukkan bahwa 31,1% variasi dampak ekonomi dapat dijelaskan oleh tingkat gangguan pembangunan, sedangkan sisanya berkaitan dengan faktor lain seperti karakteristik usaha, lokasi, ketergantungan terhadap pelanggan, dan kemampuan adaptasi. Dengan demikian, H1 didukung oleh data penelitian.

Hasil kualitatif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan telah didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan mekanisme pengelolaan keluhan. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai informasi, kewenangan, prosedur, dan komitmen pelaksana. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan tidak hanya bergantung pada ketersediaan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dan pengelola proyek menerjemahkannya menjadi tindakan yang dipahami, diakses, dan dirasakan oleh pelaku usaha terdampak.

DAFTAR REFERENSI

- Andiarsa, D., Juhairiyah, J., Adhani, R., Arbain, T., Arifin, S., Lahdimawan, A., & Laksono, A. D. (2023). Communication factors, dispositions, resources, and bureaucratic structure have an effect on the implementation of close contact tracing of COVID-19 in Banjar Regency, with policy as a moderating variable. *Asia Pacific Journal of Health Management*, 18(3). <https://doi.org/10.24083/apjhm.v18i3.2675>
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *BPSDM selenggarakan workshop social safeguards SPAM regional dan SPALD-T perkotaan di Bapekom V Yogyakarta*. BPSDM Kementerian PU.
- Bank, A. D. (2024). *Environmental and social framework*. Solving Complex. <https://doi.org/10.22617/SPR240632-2>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Egze, A., Zeleke, T., & Seyoum, A. (2023). The impact of involuntary resettlement on households' livelihood: A case study of railway infrastructure induced resettlement in South Wello zone of Amhara Region, Ethiopia. *Journal of Cleaner Production*, 420, 138402. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138402>
- Esteves, A. M. (2021). A people-centred approach to assessing livelihoods impacts. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 39(6), 478–495. <https://doi.org/10.1080/14615517.2021.1930833>
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). Implementation challenges of Indonesia's electronic-based government system: An Edwards III perspective. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 7(2), 168–180. <https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29243>
- Hasanah, N. F. U., & Yopan, M. (2026). Risk management policy implementation in local government: An analysis based on George C. Edward III theory. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 114–122. <https://doi.org/10.31314/pjia.15.1.%p.2026>
- Kahangirwe, P., & Vanclay, F. (2024). Social impacts arising from road infrastructure projects in Sub-Saharan Africa: Better management of social issues is needed in road construction, upgrading and rehabilitation. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 42(4), 309–322. <https://doi.org/10.1080/14615517.2024.2385877>
- Medhi, P., Tampubolon, D., & Hamidi, W. (2023). Dampak keberadaan Jalan Tol Bangkinang-Pekanbaru terhadap usaha masyarakat di Kecamatan Tambang

- Kabupaten Kampar. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(1), 118–128. <https://doi.org/10.51178/jecs.v5i1.1587>
- Mohamad, D., Sanggoro, H. B., Rustendi, I., & Pramono, S. A. (2022). The World Bank—Environment and Social Framework: Expectations and realities of implementing environmental and social safeguards in infrastructure projects in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(1), 225–234. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170122>
- Sulila, I. (2021). The influence of structure, resources, disposition and communication on small- and medium-sized enterprises' empowerment policy implementation in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1213–1223. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1213>
- Susandra, M. R., Aromatica, D., & Koeswara, H. (2024). Implementasi kebijakan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 90–109. <https://doi.org/10.31506/jap.v15i1.24746>
- Tyas, P. D. C. N., & Kholifah, E. (2025). Analisis dampak proses pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi terhadap keberlangsungan UMKM di Kraksaan. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(2), 8–15. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v7i2.350>
- Vanclay, F. (2003). International principles for social impact assessment. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 21(1), 5–12. <https://doi.org/10.3152/147154603781766491>
- Wibowo, M., Rahayu, H. C., Mubarak, F., Subagyo, A., Sudjana, K., & Rahman, S. U. (2024). Infrastructure expansion and its environmental impact on micro-business profitability and sustainability. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 6641. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.6641>
- Wulandari, R. T., & Effendi, M. (2022). Dampak pembangunan Jembatan Sei Alalak terhadap kondisi kegiatan ekonomi pedagang di sekitar proyek. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 98–112. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i1.5503>